

6. URUSAN SOSIAL

Sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda, 15 Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi keempat yaitu Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Yang Merata.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp16.181.995.000,00 terealisasi sejumlah Rp14.930.182.095,00 atau sebesar 92,26%. Program dan alokasi anggaran urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.6. 1.**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Sosial Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	16.181.995.000	14.930.182.095	92,26
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.545.000.000	956.224.770	61,89
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	12.718.495.000	12.507.092.684	98,34
3	Program pembinaan anak terlantar	125.000.000	108.251.500	86,60
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	330.000.000	264.098.500	80,03
5	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	40.000.000	18.962.500	47,41
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.423.500.000	1.075.552.141	75,56

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah kemampuan menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sekarang berganti menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Jumlah PPKS di Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebanyak 395.891. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dilaksanakan dalam rangka membantu PPKS untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan mengurangi beban pengeluaran bagi kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu.

Sebagai penunjang program ini dilaksanakan kegiatan antara lain, Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH), dengan melakukan fasilitasi operasional pendistribusian dan monitoring serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat program keluarga harapan sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial RTSM/KSM.

Pendampingan dan operasional bantuan pangan non tunai dilaksanakan untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan non tunai. BPNT merupakan program meningkatkan akses gizi seimbang bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Kegiatan ini meliputi perbaikan data KPM, monitoring dan evaluasi pendistribusian penyaluran bahan pokok, rapat koordinator serta rapat e-warong, supliyer dan penyedia jasa keuangan (bank).

Upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi dengan memberikan bantuan usaha kepada PMKS dilakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan KUBE fakir miskin pada 10 kelompok. Monitoring dan evaluasi kelompok KUBE juga dilaksanakan di 12 desa, yaitu; Desa Talunombo (Kec. Sapuran); Desa Candimulyo (Kec. Kertek); Desa krinjing, Desa Mutisari, Desa Kalidesel (Kec. Watumalang); Desa Besuki, Desa Gumelar, Desa Penerusan, Desa Tirip, Desa Kaligowong, Desa Kumejing (Kec. Wadaslintang); Desa Pakuncen (Kec. Selomerto).

Kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang program di atas dan untuk mendukung ketersediaan data yang valid dan up to date, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kemiskinan. Tujuan kegiatan ini selain untuk ketersediaan data, adalah sebagai dasar penyusunan perencanaan program penanganan kemiskinan yang tepat sasaran. Kegiatan ini diawali dengan Pelatihan PCL bagi admin desa, rakor admin petugas pemutakhiran, verval data Kemiskinan, entry data hasil verval, dan monitoring evaluasi program kegiatan yang tepat sasaran untuk memastikan semua rumah tangga miskin mendapatkan penanganan.

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Beragam permasalahan sosial membutuhkan penanganan yang komprehensif. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya untuk penanganan masalah tersebut. Melalui program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan pelayanan, asistensi, perlindungan, dan bantuan sosial kepada

III.A.6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara holistik, sistematis dan sesuai standar dengan tujuan memperbaiki dan berusaha mengembalikan PMKS ke dalam tataran sosial masyarakat agar mampu berperan kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yaitu pelayanan orang terlantar/kehabisan bekal ke daerah asal dan memfasilitasi warga tidak mampu yang hendak/harus mengikuti rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial/RSJ dan Pengadaan perlengkapan untuk keperluan shelter, logistik untuk *shelter* bagi PMKS PGOT hasil penertiban.

Bimbingan motivasi dan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang masih semangat berkarya demi kesejahteraan ekonomi diri dan keluarganya (56 keluarga penyandang disabilitas) dan pemberian stimulan modal usaha berupa barang. Asistensi penanganan dan pemberdayaan PMKS bagi pasca berat merupakan salah satu bentuk pemberian jaminan sosial kepada penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dilakukan melalui pemberian bantuan tunai langsung ke rekening bank yang ditunjuk bagi para Penyandang Disabilitas Berat, pendampingan kegiatan asistensi sebanyak 376 orang PPKS Penyandang Cacat Berat. Pemberian alat bantu penyandang disabilitas sebanyak 13 unit berupa kursi roda, kaki palsu dan sepatu afo.

Pada tahun 2020 hampir seluruh negara mengalami bencana pandemi Covid-19 termasuk Indonesia dengan memberikan dampak ekonomi cukup besar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan upaya untuk penanganan masyarakat paling terdampak Covid-19 dengan pengembangan jaring pengaman sosial dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui pemberian bantuan jaring pengaman sosial dalam bentuk kebutuhan pokok kepada 18.848 jiwa.

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

Sebagai wujud untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, balita terlantar, anak berhadapan dengan Hukum, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dilakukan program pembinaan anak terlantar. Bentuk kegiatan Penanganan Anak Remaja Terlantar/ Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan mengirimkan anak remaja terlantar/tidak mampu/putus sekolah dan ABH yang mempunyai minat mengikuti keterampilan untuk mengikuti bimbingan mental dan keterampilan dan keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke ABH PPSA Dharma Putera Purworejo, PPS Wira Adhi Karya Ungaran, PPSA Taruna Yodha Sukoharjo, Tawangmangu, dan Perlombaan bidang olahraga dan seni untuk anak-anak panti asuhan. Pemberian bantuan tambahan nutrisi bagi anak terlantar/ berkebutuhan khusus/ dari keluarga tidak mampu diberikan kepada 25 anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.

Pendampingan Adopsi dilakukan untuk mendukung pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial anak dengan memberikan layanan bagi para pemohon ijin adopsi anak melalui verifikasi berkas permohonan, pendampingan *assesment* dan kunjungan rumah, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (rekomendasi dan SK Ijin Pengangkatan Anak) bagi calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Serta dilakukannya pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami permasalahan dengan harapan mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal sesuai potensinya.

4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan ketrampilan bagi penyandang cacat dan trauma melalui pembinaan dan bantuan stimulan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fasilitasi Kegiatan Penyandang Disabilitas sebagai pendukung dalam meningkatkan pelayanan para penyandang disabilitas dalam pemenuhan aktualisasi dan eksistensi diri bagi para penyandang disabilitas melalui pembinaan, pemberian fasilitas dan pemenuhan alat serta perlengkapan untuk sarana latihan olahraga bagi penyandang disabilitas. *Family Support Group* sebagai bentuk forum komunikasi para orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas untuk berbagi pendapat dan pengalaman yang bertujuan untuk membangun pemahaman tentang fungsi keluarga dalam upaya perawatan, pengasuhan, pemulihan serta mendukung kemandirian bagi para penyandang disabilitas.

Untuk meningkatkan kemandirian bagi penyandang disabilitas, dilaksanakan seminar dan diskusi kewirausahaan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Pemberian bantuan stimulan biaya transport bagi penderita penyakit kronis dari keluarga tidak mampu sehingga dapat melanjutkan proses pengobatan.

5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah Penertiban dan Pembinaan Tuna Sosial. Hal ini sebagai salah satu usaha represif untuk mengurangi dan atau meniadakan gelandangan, pengemis, pengamen serta PSK melalui razia dan dilanjutkan dengan pembinaan. Serta pembinaan kepada para eks tuna sosial agar tidak kembali terjerumus di jalan yang tidak semestinya.

6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat khususnya organisasi sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM) melawan sosial dan dunia usaha. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu operasional TKSK. Tenaga kesejahteraan sosial ini sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan dengan harapan terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Pembinaan dan bulan bhakti karang taruna melalui lomba antar karang taruna se wilayah Kabupaten Wonosobo dan pembinaan kegiatan inovasi ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan fungsi kelembagaan sosial dalam melayani masyarakat dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan, dilaksanakan pengembangan pengelolaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Upaya dalam meningkatkan peran PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanganan PSKS yang termasuk dalam penanganan bencana, dilaksanakan kegiatan

III.A.6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

pembinaan dan pendampingan kegiatan PSKS serta pemberian insentif kepada Taruna Siaga Bencana (Tagana) melalui Fasilitas PSKS.

c. Capaian Kinerja

Tabel IV.A.6. 2

Capaian Kinerja Urusan Sosial Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020		% Capaian	Status Capaian	Target RPJMD 2021
				Target	Capaian			
1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	%	93,19	93,68	94,36	100,73	ST	95%
2	Persentase PMKS yang mendapatkan bansos	%	68,18	59	71,30	120,85	ST	63,20%
3	Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	71,43	55,46	71,43	128,80	ST	61%
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	%	27,62	25	46,20	184,80	ST	30%
5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	71,43	54,50	24,38	44,73	SR	60%
6	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	63,31	68,80	70,28	102,15	ST	74,40%

III.A.6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020		% Capaian	Status Capaian	Target RPJMD 2021
				Target	Capaian			
7	Persentase penyandang cacat dan trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi	%	45,95	64	55,67	86,98	T	65%
8	Jumlah panti sosial	Satuan	21	19	21	110,53	ST	20
9	Persentase panti sosial berbadan hukum	%	86	95	95,24	100,25	ST	100%
10	Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	%	56,52	55	79,17	143,95	ST	60%
11	Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS	%	117	30	18,34	61,13	R	40%
12	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	67,09	56,57	70,84	125,23	ST	60%
13	Cakupan Raskin/BPNT terhadap Rumah Tangga Miskin	%	69,43	75,86	72,48	95,54	T	79,42%
14	Persentase rata- rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	%	3,80	2	2,90	145	ST	2,50%

Sumber: Dinsos PMD dan Bagian Kesra Setda, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Sosial Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 14 indikator Kinerja Program urusan Sosial.
- Realisasi Kinerja Indikator Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 10 indikator.
- Realisasi Kinerja Indikator Program Kategori Tinggi sebanyak 1 Indikator.
- Realisasi Kinerja Indikator Program Kategori Sedang sebanyak 1 Indikator.

PMKS yang mendapatkan jaminan sosial pada tahun 2020 adalah 378.811 jiwa, dengan angka ini maka capaian indikator persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial mengalami kenaikan 1,26% dari tahun 2019. PMKS yang mendapatkan jaminan sosial terbagi dalam beberapa program antara lain PKH 42.120 KPM, KIS PBI baik yang bersumber APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Wonosobo sejumlah 350.891 jiwa dan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebanyak 70 jiwa.

Persentase PMKS yang mendapatkan bansos juga mengalami peningkatan, serta capaian target pada tahun 2020 telah melampaui target masa akhir RPJMD yaitu 71,30% namun hal ini akan tetap dilaksanakan hingga semua masalah PMKS di Kabupaten Wonosobo dapat tertangani, mengingat permasalahan PMKS/ PPKS sangat kompleks terutama permasalahan terkait data PPKS yang selama ini masih banyak yang belum dilaporkan, sehingga akan mempengaruhi jumlah cakupan data dan cakupan penerima layanan. Sampai dengan tahun 2020 jumlah PMKS yang mendapatkan bansos adalah 282.275 jiwa.

III.A.6. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Indikator yang mengalami penurunan capaian pada tahun 2020 adalah persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dari tahun 2019 71,43% menjadi 24,38%. Penurunan ini sangat drastis dari tahun sebelumnya, dikarenakan terjadinya bencana Pandemi Covid-19. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat (Kementrian) untuk menangani pandemi ini, terutama dalam hal pengalihan anggaran. Salah satu dampak dari hal tersebut adalah pengurangan jumlah kuota bantuan untuk kelompok KUBE, sementara selama ini dukungan program pemberdayaan melalui KUBE paling banyak difasilitasi dari pemerintah pusat (Kementrian Sosial).

Jumlah penyandang cacat dan trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi pada tahun 2020 adalah 4.173 dari jumlah keseluruhan yaitu 7.496 orang. Beberapa program sudah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini, walaupun capaian belum 100% namun capaian sudah tinggi sebesar 86,98% dari target yang telah ditentukan.

Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS 18,34% atau hanya 61,13% dari target yang telah ditentukan. Angka ini juga menurun dari capaian 2019, namun tetap ada peningkatan dalam penerimaan zakat tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar Rp357.773.020,00. Pentasyarufan Dana Zakat pada tahun 2020 dilakukan melalui beberapa program antara lain, Bantuan penanggulangan Covid-19 melalui Satuan Tugas Kabupaten Wonosobo, Pemberian paket sembako bagi warga terdampak Covid-19. Program jambanisasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kepil, Desa Bumiroso Kecamatan Watumalang, Ponpes Ma'had Mambaul Quran dan Ponpes Ululul Quran Kecamatan Mojotengah. Untuk program pendidikan melalui santunan kepada siswa dari keluarga tidak mampu untuk pendidikan setingkat SD, SMP dan SMA.

Cakupan Raskin/ BPNT terhadap rumah tangga miskin pada mengalami kenaikan 4,4% dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari jumlah penerima manfaat dari program raskin/ BPNT pada tahun 2020 sebanyak 82.488 KPM.

Secara umum capaian kinerja urusan sosial pada tahun 2020 mengalami kenaikan bahkan ada yang sudah mencapai target RPJMD 2021 yaitu Persentase PMKS yang mendapatkan bansos, Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Persentase rata- rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Sosial atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.A.6. 3

Tabel Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2020

No.	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Evaluasi data DTKS agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sehingga tidak muncul gejala di masyarakat	Sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kemiskinan yang diawali dengan pelatihan PCL untuk admin desa dan juga dilakukan musyawarah kelurahan/ desa untuk pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selanjutnya akan diusulkan melalui SIKS NG dan rakor verifikasi validasi DTKS
2.	Keseragaman penggunaan data untuk menentukan sasaran program pengentasan kemiskinan	Penyediaan data melalui DTKS melalui aplikasi SIKS NG dan dilakukan verifikasi dan validasi 4 kali dalam satu tahun

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan sosial serta upaya yang perlu dilakukan adalah:

Tabel III.A.6.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Sosial

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan sosial dalam rangka penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan keterpaduan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelayanan masih terpecah dan belum terintegrasi, sehingga banyak program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tumpang tindih.	- Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait program penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) - Membentuk puskesmas baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa sebagai penyelenggara pelayanan terpadu kesejahteraan sosial yang melibatkan stakeholder, keluarga dan masyarakat.
2.	Masih banyak data rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang belum lengkap dan tidak valid khususnya NIK, sehingga rentan untuk dihapus sebagai penerima program nangkis dan bansos oleh Kemensos.	Membentuk tim data dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang melibatkan Dinas Dukcapil dalam rangka pengecekan dan pemadanan NIK.
3.	Keterbatasan kapasitas SDM maupun sarana dan prasarana bagi penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai kewenangan kabupaten antara lain, belum tersedianya	- Memanfaatkan pelayanan shelter meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana. - Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terkait

III.A.6. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial**

No.	Permasalahan	Solusi
	rumah singgah sebagai pelayanan rehabilitasi awal di luar panti.	penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti.